

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *AR-RAHN* UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM PADA KSPPS BMT SURYA RAHARJA CABANG JETIS

M. Alfarizi¹, Amir Ambyah Zakaria²

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Email: rziimhd02@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* dalam mendukung kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pihak pengelola KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis dan anggota penerima pembiayaan *Ar-Rahn*. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengajuan pembiayaan, pemenuhan persyaratan, pemeriksaan dan penilaian barang jaminan, penetapan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring dan penyelesaian kewajiban pembiayaan. Dana yang diterima anggota umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, membeli bahan baku, menambah persediaan, dan membiayai operasional usaha. Pemanfaatan pembiayaan tersebut berkontribusi terhadap penguatan modal dan keberlangsungan usaha, yang selanjutnya mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Namun, kontribusi pembiayaan terhadap kesejahteraan belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan penjualan dan keuntungan karena setiap anggota menghadapi kondisi usaha yang berbeda. Faktor pendukung implementasi pembiayaan meliputi kebutuhan modal usaha, mekanisme pembiayaan berbasis jaminan, komunikasi antara pihak BMT dan anggota, pemahaman terhadap prosedur pembiayaan, serta pemanfaatan dana untuk kegiatan produktif. Sementara itu, faktor penghambat mencakup ketidakstabilan penjualan, perubahan kondisi pasar, kebutuhan rumah tangga, dan keterbatasan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap kesejahteraan pelaku UMKM terutama tercermin dalam penguatan modal dan keberlangsungan usaha, dengan manfaat ekonomi yang bervariasi sesuai kondisi masing-masing anggota.

Kata kunci: *Implementasi; Pembiayaan Ar-Rahn; Kesejahteraan; UMKM.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of *Ar-Rahn* financing in supporting the welfare of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) at KSPPS BMT Surya Raharja Jetis Branch and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses a qualitative approach with the type of field research. Data was collected through observation, interviews, and documentation involving the management of KSPPS BMT Surya Raharja Jetis

Branch and members of *Ar-Rahn* financing recipients. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn, while the validity of the data was tested through triangulation. The results of the study show that the implementation of *Ar-Rahn* financing is carried out through a series of stages, starting from financing submissions, fulfilling requirements, examining and assessing collateral, determining the financing amount, implementing contracts, disbursing funds, to monitoring and settling financing obligations. The funds received by members are generally used to meet working capital needs, purchase raw materials, increase inventory, and finance business operations. The use of financing contributes to strengthening capital and business sustainability, which in turn supports the fulfillment of members' economic needs. However, the contribution of financing to welfare has not been fully reflected in increasing sales and profits because each member faces different business conditions. Supporting factors for financing implementation include business capital needs, guarantee-based financing mechanisms, communication between BMT and members, understanding financing procedures, and the use of funds for productive activities. Meanwhile, inhibiting factors include sales instability, changes in market conditions, household needs, and limited members' ability to meet financing obligations. This study shows that *Ar-Rahn's* financing contribution to the welfare of MSME actors is mainly reflected in strengthening capital and business sustainability, with economic benefits varying according to the conditions of each member.

Keywords: *Implementation; Ar-Rahn Financing; Welfare; MSMEs.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat karena berkaitan dengan kegiatan produksi, perdagangan, penyediaan jasa, serta sumber pendapatan rumah tangga. Keberlangsungan usaha UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola kegiatan usahanya, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang memadai¹. Keterbatasan modal dapat menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menambah persediaan, membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan operasional, maupun mempertahankan kegiatan usaha ketika menghadapi kebutuhan dana tambahan. Dalam konteks perekonomian Indonesia, kebutuhan pembiayaan bagi sektor UMKM memiliki skala yang cukup besar². Skripsi yang menjadi dasar artikel ini mencatat bahwa debit kredit UMKM pada kelompok bank di Indonesia pada Desember 2024 mencapai sekitar Rp1.506,29 triliun. Data tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya aktivitas pembiayaan yang berkaitan dengan sektor UMKM, meskipun besarnya penyaluran pembiayaan tidak dengan sendirinya menunjukkan peningkatan kesejahteraan seluruh penerima pembiayaan³.

Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan dana, tetapi juga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan diarahkan pada

¹ Munim, M., Indah Tri Kusuma, dan Wahyu Qomariatul Khoiriyah. "Penerapan Akad Rahn Tasjily sebagai Alternatif Pembiayaan pada Produk Barokah UMKM." *Journal of Islamic Banking* 6, no. 2 (2025): 52–70.

² Alie, Maria Septijantini, dan Amelia Anwar. "Optimalisasi Akad Rahn Tasjily dalam Pembiayaan UMKM: Studi pada Toko Kelontongan di Bandar Lampung." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

³ Aditya, M. Fajar, Miswan Ansori, dan Ahmad Fauzan Mubarak. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 2 (2024): 3444–3455.

terciptanya kemanfaatan bagi pihak yang terlibat⁴. Salah satu akad yang dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan dana adalah *Ar-Rahn*. Secara konseptual, *Rahn* merupakan akad penahanan atau penyerahan barang yang memiliki nilai sebagai jaminan atas kewajiban tertentu. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, mekanisme tersebut memungkinkan anggota memperoleh dana dengan menyerahkan barang bernilai sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan akad. Dengan karakteristik tersebut, pembiayaan *Ar-Rahn* dapat menjadi salah satu alternatif bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan ekonomi, khususnya ketika keterbatasan modal menjadi salah satu kendala dalam menjalankan usaha⁵.

KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* karena lembaga tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat dan menjalankan aktivitas pembiayaan berbasis syariah. Berdasarkan data awal penelitian, terdapat 48 anggota dengan total plafon pembiayaan sebesar Rp213.000.000. Data tersebut digunakan sebagai gambaran mengenai keberadaan dan skala pembiayaan *Ar-Rahn* pada objek penelitian, bukan sebagai indikator langsung bahwa pembiayaan tersebut telah meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal tersebut penting karena besarnya plafon pembiayaan belum dapat menjelaskan bagaimana proses pembiayaan berlangsung, untuk keperluan apa dana digunakan, maupun manfaat yang benar-benar dirasakan oleh penerima pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami proses pembiayaan *Ar-Rahn* secara lebih mendalam, mulai dari tahapan pengajuan dan pencairan hingga pemanfaatan dana oleh anggota serta kondisi yang mereka alami setelah memperoleh pembiayaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara pembiayaan syariah, perkembangan usaha, dan kesejahteraan pelaku UMKM. Penelitian Ely Wahyuni mengenai pembiayaan Qardhul Hasan dan *Rahn* pada KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menunjukkan adanya pengaruh pembiayaan *Rahn* terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Penelitian lainnya juga mengkaji peran pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan UMKM serta kesejahteraan berdasarkan perspektif *Maqashid al-Shariah*. Temuan-temuan tersebut memberikan dasar bahwa pembiayaan syariah merupakan salah satu aspek yang relevan dalam pembahasan kondisi ekonomi pelaku UMKM. Namun, penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan kuantitatif lebih banyak berfokus pada hubungan atau pengaruh antarvariabel, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana proses implementasi pembiayaan berlangsung, bagaimana anggota memanfaatkan dana yang diperoleh, serta faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan memberikan manfaat yang berbeda bagi anggota.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian dengan pendekatan kualitatif yang dapat menggali pengalaman anggota secara langsung⁶. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian tidak hanya melihat pembiayaan sebagai suatu variabel, tetapi juga memahami proses yang terjadi di balik penerimaan dan pemanfaatan dana. Melalui pengalaman anggota, penelitian dapat menelusuri tahapan pembiayaan *Ar-Rahn*, tujuan penggunaan dana,

⁴ Gina, Widya, dan Jaenal Effendi. "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro." *Al-Muzara'ah*.

⁵ Ismaulina, Desi Misra Resa, dan Syafril Nasution. "Peningkatan Pendapatan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah dan Pemberdayaan." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 10, no. 2 (2022).

⁶ Harp, Aphylla Planifolia, Resfa Fitri, dan Yekti Mahanani. "Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada Masa Pandemi Covid-19." *Al-Muzara'ah* 9, no. 1 (2021): 109–127.

bentuk pemanfaatannya dalam kegiatan usaha, serta perubahan yang dirasakan dalam keberlangsungan usaha. Selain itu, penelitian dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi manfaat pembiayaan, baik yang berasal dari kemampuan anggota dalam mengelola dana maupun dari proses pelayanan, pendampingan, monitoring, kondisi usaha, dan lingkungan ekonomi⁷.

Dalam penelitian ini, kesejahteraan pelaku UMKM tidak dipahami secara luas sebagai keseluruhan kondisi sosial dan ekonomi anggota, tetapi dibatasi pada aspek yang dapat digali berdasarkan pengalaman dan data lapangan, yaitu penguatan modal, keberlangsungan usaha, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi⁸. Penguatan modal berkaitan dengan pemanfaatan pembiayaan untuk menambah atau mempertahankan modal usaha. Keberlangsungan usaha berkaitan dengan kemampuan anggota mempertahankan aktivitas usaha setelah memperoleh pembiayaan⁹. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan ekonomi berkaitan dengan manfaat pembiayaan yang dirasakan anggota dalam mendukung kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas usaha maupun kebutuhan ekonomi lainnya yang dapat dijelaskan berdasarkan temuan penelitian. Pembatasan ini dimaksudkan agar pembahasan mengenai kesejahteraan tidak melampaui informasi empiris yang dapat diperoleh dari informan¹⁰.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kontribusi empiris dalam menjelaskan proses implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* pada tingkat lokal, pemanfaatan dana oleh anggota, serta faktor-faktor yang memengaruhi manfaat pembiayaan bagi kondisi ekonomi pelaku UMKM. Penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah pembiayaan berhubungan dengan kesejahteraan, tetapi menggali bagaimana pembiayaan tersebut dijalankan dan dimanfaatkan serta kondisi apa yang menentukan manfaatnya bagi anggota. Perspektif tersebut diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu yang lebih menekankan pengujian hubungan antarvariabel melalui pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* pada KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis, menganalisis pemanfaatan dana pembiayaan oleh pelaku UMKM, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi manfaat pembiayaan dalam penguatan modal, keberlangsungan usaha, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Penelitian ini tidak menempatkan pembiayaan *Ar-Rahn* sebagai satu-satunya penyebab perubahan kondisi kesejahteraan, melainkan menelusuri kontribusi dan manfaatnya berdasarkan pengalaman anggota serta kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.

⁷ Rinawati, Ika, Irfan Musadat, dan Andriati Aziizah Syafitri. "Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Pelaku UMKM." *Jurnal Keuangan Islam dan Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 74–84.

⁸ Rumasukun, Sitti Harnita, dan Nani Hanifah. "Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 61–72.

⁹ Sekolah, Andi Zakaria. "Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kemajuan UMKM di Indonesia: Studi Empiris." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 2 (2024).

¹⁰ Triana, Duama Zunin, M. Ridho, Sopian Ali, Muhammad Zaki, dan Maburri. "Peran Pembiayaan Syariah dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 3 (2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*)¹¹. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pembiayaan Ar-Rahn, pemanfaatan dana pembiayaan, serta manfaat yang dirasakan oleh anggota dalam mendukung penguatan modal, keberlangsungan usaha, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung dari kondisi empiris pada lokasi penelitian serta menggali pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan Ar-Rahn.

Penelitian dilaksanakan di KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis, Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan layanan pembiayaan *Ar-Rahn* serta keterlibatan lembaga dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, termasuk pelaku UMKM. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait pembiayaan Ar-Rahn. Informan dalam penelitian mencakup pihak internal lembaga dan anggota penerima pembiayaan. Berdasarkan data dalam skripsi yang menjadi dasar artikel ini, informan yang diwawancarai antara lain Nita Dewi Setia Nengrum selaku Manajer KSPPS BMT Surya Raharja KCP Jetis dan Sudarmi selaku anggota penerima pembiayaan Ar-Rahn. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip yang berkaitan dengan objek penelitian serta informasi pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive¹², yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, keterlibatan, dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Pihak pengelola atau petugas lembaga dipilih karena memahami mekanisme dan pelaksanaan pembiayaan Ar-Rahn, sedangkan anggota penerima pembiayaan dipilih karena mengalami secara langsung proses pengajuan, penerimaan, dan pemanfaatan dana pembiayaan. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari perspektif lembaga sekaligus perspektif penerima pembiayaan sehingga proses implementasi dan manfaat pembiayaan dapat dipahami secara lebih utuh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi¹³. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lokasi penelitian, aktivitas pelayanan pembiayaan, interaksi antara petugas dan anggota, serta aktivitas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan Ar-Rahn. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai tahapan pembiayaan, alasan anggota mengajukan pembiayaan, pemanfaatan dana yang diterima, perkembangan kegiatan usaha, serta manfaat dan kendala yang dirasakan setelah memperoleh pembiayaan. Wawancara juga diarahkan kepada pihak lembaga untuk memperoleh informasi mengenai prosedur, pelayanan, monitoring, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembiayaan Ar-Rahn. Sementara itu,

¹¹ Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

¹² Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln, eds. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

¹³ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara melalui dokumen, arsip, catatan, maupun data lain yang relevan dengan penelitian¹⁴.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman¹⁵, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan tema untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola dan keterkaitan antartemuan. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasikan pola dan makna yang ditemukan serta memeriksa kembali kesesuaiannya dengan data yang telah diperoleh di lapangan¹⁶.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pihak pengelola lembaga dengan informasi dari anggota penerima pembiayaan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Apabila diperlukan, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan atau pengecekan informasi pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi data. Proses tersebut dilakukan agar informasi yang digunakan dalam analisis memiliki tingkat kredibilitas yang memadai.

Penelitian ini bersifat kontekstual¹⁷, sehingga temuan penelitian menggambarkan kondisi dan pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan *Ar-Rahn* pada KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh pelaku UMKM maupun seluruh lembaga keuangan mikro syariah. Kontribusi penelitian diarahkan pada pemahaman empiris mengenai bagaimana pembiayaan *Ar-Rahn* diimplementasikan, bagaimana dana dimanfaatkan oleh anggota, serta faktor-faktor yang memengaruhi manfaat pembiayaan bagi penguatan modal, keberlangsungan usaha, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pembiayaan Ar-Rahn

Berdasarkan data penelitian yang bersumber dari dokumen pada KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis, terdapat 48 anggota yang memperoleh pembiayaan *Ar-Rahn* dengan total plafon sebesar Rp213.000.000. Besaran plafon pembiayaan yang diterima anggota bervariasi, mulai dari sekitar Rp1.000.000 hingga Rp20.000.000. Variasi nominal tersebut menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan pembiayaan di antara anggota, baik dalam memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan ekonomi lainnya.

Data jumlah anggota dan plafon pembiayaan tersebut digunakan sebagai gambaran empiris mengenai pelaksanaan produk *Ar-Rahn* pada objek penelitian. Besarnya plafon tidak diposisikan sebagai indikator langsung peningkatan kesejahteraan anggota karena nominal pembiayaan belum dapat menjelaskan bagaimana dana digunakan dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh penerima. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kontribusi

¹⁴ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

¹⁵ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

¹⁷ Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

pembiayaan terhadap kondisi ekonomi anggota didasarkan terutama pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Ar-Rahn* memiliki posisi sebagai salah satu fasilitas pembiayaan yang digunakan anggota untuk memperoleh tambahan dana. Namun, keberadaan pembiayaan baru dapat memberikan manfaat ekonomi apabila dana yang diterima dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan anggota dalam menjalankan usaha serta memenuhi kewajibannya.

2. Implementasi Pembiayaan *Ar-Rahn* pada KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu pengajuan pembiayaan, pemenuhan persyaratan, pemeriksaan dan penilaian barang jaminan, penetapan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, pemanfaatan pembiayaan, monitoring, pembayaran kewajiban, dan penyelesaian pembiayaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan tidak berhenti pada tahap pencairan dana, tetapi merupakan rangkaian proses yang berlangsung sejak anggota mengajukan pembiayaan hingga kewajiban pembiayaan diselesaikan.

Pada tahap awal, anggota menyampaikan kebutuhan pembiayaan kepada pihak BMT dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Barang yang akan digunakan sebagai jaminan kemudian diperiksa dan dinilai oleh pihak lembaga. Tahap ini memiliki fungsi penting karena menjadi dasar bagi lembaga dalam menentukan kelayakan dan besaran pembiayaan yang dapat diberikan. Dari sisi anggota, tahapan tersebut juga menjadi bagian dari proses untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pembiayaan.

Tahap selanjutnya adalah penetapan pembiayaan dan pelaksanaan akad. Pada tahap ini, komunikasi antara petugas dan anggota menjadi penting, terutama berkaitan dengan jumlah pembiayaan, ketentuan pembayaran, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai barang jaminan. Kejelasan informasi pada tahap tersebut dapat membantu anggota memahami konsekuensi pembiayaan yang diterima. Hal ini sejalan dengan perspektif Edwards III yang menempatkan komunikasi sebagai salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena informasi mengenai ketentuan dan tujuan harus dapat dipahami oleh pihak yang melaksanakan maupun menerima program.

Setelah pembiayaan dicairkan, proses implementasi berlanjut pada pemanfaatan dana, monitoring, dan pemenuhan kewajiban anggota. Monitoring menjadi bagian penting karena memungkinkan lembaga mengetahui perkembangan pembiayaan dan kondisi anggota setelah dana diterima. Dalam kondisi tertentu ketika anggota mengalami kesulitan pembayaran, penyelesaian tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga memerlukan komunikasi antara petugas dan anggota untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan keterlambatan atau kesulitan pembayaran.

Jika dianalisis melalui teori implementasi Edwards III, pelaksanaan pembiayaan *Ar-Rahn* dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Komunikasi tercermin dalam penyampaian persyaratan, ketentuan akad, dan kewajiban anggota. Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan petugas serta sarana yang mendukung proses pelayanan. Sikap pelaksana tercermin dari bagaimana petugas memberikan pelayanan dan merespons kondisi anggota. Sementara itu, struktur birokrasi terlihat melalui adanya prosedur dan tahapan yang harus dilalui dalam pembiayaan.

Dengan demikian, implementasi *Ar-Rahn* pada objek penelitian menunjukkan bahwa keteraturan prosedur merupakan bagian penting dalam menjaga proses pembiayaan tetap terarah. Namun, prosedur yang terstruktur perlu diikuti dengan komunikasi yang mudah dipahami agar anggota tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memahami konsekuensi akad, kewajiban pembayaran, serta ketentuan yang berkaitan dengan barang jaminan.

3. Pemanfaatan Pembiayaan *Ar-Rahn* dalam Kegiatan UMKM

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi anggota sebelum memperoleh pembiayaan adalah keterbatasan modal. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kemampuan anggota dalam membeli bahan baku, menambah persediaan, maupun memenuhi kebutuhan operasional usaha. Dalam kondisi tertentu, pelaku usaha harus menunggu hasil penjualan terkumpul sebelum dapat melakukan pembelian kembali. Keadaan tersebut berpotensi menghambat kelancaran perputaran modal usaha.

Setelah memperoleh pembiayaan, dana digunakan terutama untuk menambah modal kerja, membeli bahan baku, memenuhi persediaan, dan mendukung kegiatan operasional usaha. Pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *Ar-Rahn* bagi anggota tidak semata-mata dipahami sebagai tambahan dana, tetapi digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan modal ketika kemampuan modal internal belum mencukupi.

Pemanfaatan dana untuk kebutuhan produktif menjadi aspek penting dalam memahami manfaat pembiayaan. Ketika dana digunakan untuk membeli bahan baku atau menambah persediaan, pembiayaan dapat membantu anggota mempertahankan aktivitas usaha. Namun demikian, pemanfaatan pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari kondisi usaha masing-masing anggota. Perbedaan jenis usaha, tingkat permintaan, kondisi pasar, kemampuan mengelola modal, dan kebutuhan ekonomi keluarga dapat menyebabkan manfaat pembiayaan yang dirasakan setiap anggota berbeda.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencairan pembiayaan tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan pendapatan. Perubahan pendapatan atau keuntungan masih dipengaruhi oleh kemampuan anggota mengelola usaha, tingkat penjualan, kondisi pelanggan, harga bahan baku, persaingan, kebutuhan rumah tangga, serta kewajiban pembayaran pembiayaan. Dengan demikian, manfaat pembiayaan lebih tepat dipahami melalui proses pemanfaatan dana dan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh anggota daripada hanya berdasarkan nominal pembiayaan yang diterima.

4. Kontribusi Pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap Kondisi Ekonomi Pelaku UMKM

Dalam penelitian ini, kesejahteraan pelaku UMKM dibatasi pada aspek yang dapat ditelusuri berdasarkan pengalaman dan informasi empiris dari anggota, yaitu penguatan modal, keberlangsungan usaha, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pembatasan tersebut diperlukan agar konsep kesejahteraan tidak digunakan secara terlalu luas dan tetap sesuai dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat pembiayaan yang paling terlihat berkaitan dengan penguatan modal usaha. Tambahan dana memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperoleh bahan baku, menambah persediaan, dan memenuhi kebutuhan operasional yang sebelumnya terkendala keterbatasan modal. Kondisi tersebut membantu anggota mempertahankan kegiatan usaha dan menjaga agar aktivitas usaha tetap berjalan.

Kontribusi berikutnya terlihat pada keberlangsungan usaha. Ketersediaan tambahan modal memungkinkan anggota melakukan aktivitas usaha tanpa sepenuhnya bergantung pada modal internal atau harus menunggu seluruh hasil penjualan sebelumnya untuk melakukan pembelian kembali. Dengan demikian, pembiayaan dapat berperan sebagai salah satu pendukung kontinuitas kegiatan usaha. Namun, keberlangsungan tersebut tetap dipengaruhi oleh kondisi usaha dan kemampuan anggota dalam mengelola dana yang diperoleh.

Dari aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi, kelancaran kegiatan usaha dapat memberikan ruang bagi anggota untuk memperoleh pendapatan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Akan tetapi, pengalaman anggota tidak menunjukkan perubahan yang seragam. Sebagian anggota dapat merasakan manfaat dalam bentuk meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan tertentu, sementara anggota lainnya lebih merasakan manfaat dalam bentuk bertahannya kegiatan usaha dan tersedianya modal kerja.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak menempatkan peningkatan pendapatan, tabungan, atau kepemilikan aset sebagai indikator yang secara otomatis berlaku bagi seluruh anggota. Temuan yang lebih konsisten adalah adanya manfaat dalam bentuk penguatan modal, ketersediaan bahan baku dan persediaan, kelancaran kegiatan operasional, serta dukungan terhadap keberlangsungan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan *Ar-Rahn* terhadap kondisi ekonomi anggota bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh cara anggota memanfaatkan dana serta kondisi usaha yang dihadapi.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa kesejahteraan dalam konteks pelaku UMKM tidak semata-mata dapat dilihat dari perubahan nominal pendapatan. Kemampuan mempertahankan usaha, memenuhi kebutuhan modal, menjaga kelancaran operasional, dan memenuhi kebutuhan ekonomi merupakan bagian dari pengalaman ekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam memahami manfaat pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan *Ar-Rahn* dapat dipahami sebagai salah satu instrumen pendukung kondisi ekonomi anggota, bukan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi pembiayaan *Ar-Rahn*. Faktor tersebut antara lain adanya kebutuhan anggota terhadap tambahan modal, tersedianya mekanisme pembiayaan dengan jaminan, komunikasi antara petugas dan anggota, adanya prosedur pembiayaan yang jelas, serta pemanfaatan dana untuk kegiatan produktif. Selain itu, kemampuan anggota dalam mengelola modal dan memutar kembali hasil usaha juga menjadi faktor yang mendukung keberlanjutan manfaat pembiayaan.

Kebutuhan modal menjadi faktor penting karena pembiayaan digunakan ketika modal internal anggota belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan usaha. Sementara itu, mekanisme pembiayaan dengan jaminan memberikan alternatif bagi anggota untuk memperoleh dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga. Komunikasi antara petugas dan anggota juga berperan dalam membantu anggota memahami persyaratan, mekanisme akad, kewajiban pembayaran, dan ketentuan pembiayaan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat manfaat pembiayaan. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan ketidakstabilan penjualan, perubahan kondisi pasar, kebutuhan ekonomi rumah tangga, serta kemampuan anggota dalam memenuhi

kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan tidak menghilangkan risiko yang melekat pada aktivitas usaha. Ketika penjualan mengalami penurunan, kemampuan anggota untuk memutar modal dan memenuhi kewajiban pembiayaan juga dapat mengalami tekanan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara penggunaan modal, kinerja usaha, kebutuhan ekonomi, dan kewajiban pembiayaan. Oleh karena itu, manfaat pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh keputusan lembaga dalam memberikan pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan anggota dalam mengelola dana dan menghadapi dinamika usaha.

Pembahasan

1. Implementasi Pembiayaan *Ar-Rahn* dalam Mendukung Aktivitas Ekonomi Anggota

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* pada KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap, mulai dari pengajuan pembiayaan, pemenuhan persyaratan, pemeriksaan dan penilaian barang jaminan, penetapan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, pemanfaatan dana, monitoring, hingga penyelesaian kewajiban anggota. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *Ar-Rahn* tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas penyaluran dana, tetapi sebagai rangkaian proses yang melibatkan interaksi antara lembaga dan anggota.

Pada tahap awal, anggota menyampaikan kebutuhan pembiayaan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga. Pemeriksaan terhadap barang jaminan menjadi bagian penting dalam proses tersebut karena berkaitan dengan penentuan pembiayaan yang dapat diberikan. Prosedur ini menunjukkan adanya upaya lembaga untuk menjaga kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan sekaligus memastikan bahwa transaksi berlangsung sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, prosedur tersebut penting karena pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan hubungan finansial, tetapi juga dengan pelaksanaan akad dan pemenuhan hak serta kewajiban kedua belah pihak.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori implementasi Edwards III yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Pada pembiayaan *Ar-Rahn*¹⁸, komunikasi terlihat dari penyampaian informasi mengenai persyaratan, akad, jumlah pembiayaan, jangka waktu, kewajiban pembayaran, dan ketentuan barang jaminan. Sementara itu, struktur birokrasi tercermin dari adanya tahapan dan prosedur yang harus dilalui anggota sebelum memperoleh pembiayaan. Artinya, implementasi pembiayaan tidak hanya bergantung pada tersedianya produk *Ar-Rahn*, tetapi juga pada kemampuan lembaga menerjemahkan prosedur tersebut ke dalam pelayanan yang dapat dipahami dan dijalankan oleh anggota.

Aspek komunikasi menjadi semakin penting karena anggota memiliki tingkat pemahaman dan kebutuhan yang berbeda. Penjelasan mengenai akad dan kewajiban pembiayaan yang disampaikan secara jelas dapat membantu mengurangi kesalahpahaman antara lembaga dan anggota. Dengan demikian, kualitas komunikasi tidak hanya berfungsi

¹⁸ Munim, M., Indah Tri Kusuma, dan Wahyu Qomariatul Khoiriyah. "Penerapan Akad Rahn Tasjily sebagai Alternatif Pembiayaan pada Produk Barokah UMKM." *Journal of Islamic Banking* 6, no. 2 (2025): 52–70.

sebagai pelengkap administratif, tetapi menjadi bagian dari proses implementasi yang menentukan bagaimana anggota memahami pembiayaan yang diterimanya.

2. Pemanfaatan Dana Pembiayaan dan Keberlangsungan Usaha

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan modal menjadi salah satu alasan anggota menggunakan pembiayaan *Ar-Rahn*. Dana yang diperoleh terutama dimanfaatkan untuk menambah modal kerja, membeli bahan baku, menambah persediaan, dan memenuhi kebutuhan operasional usaha¹⁹. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan berfungsi sebagai tambahan sumber modal ketika modal internal anggota belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan usaha.

Pemanfaatan dana untuk kegiatan produktif menjadi aspek penting dalam menjelaskan manfaat pembiayaan²⁰. Tambahan modal memungkinkan anggota melakukan pembelian bahan baku atau persediaan tanpa harus sepenuhnya menunggu akumulasi hasil penjualan sebelumnya. Kondisi tersebut dapat membantu menjaga kontinuitas aktivitas usaha. Dengan demikian, manfaat pembiayaan tidak muncul semata-mata karena anggota memperoleh dana, tetapi melalui proses pemanfaatan dana tersebut dalam aktivitas ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Gina dan Effendi yang menunjukkan bahwa pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah berkaitan dengan upaya mendukung kegiatan usaha mikro dan peningkatan kondisi ekonomi pelaku usaha. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian mengenai pembiayaan syariah terhadap UMKM yang menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan dapat menjadi salah satu sumber dukungan bagi pengembangan kegiatan usaha²¹.

Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan pembiayaan tidak selalu menghasilkan perubahan pendapatan yang sama pada setiap anggota. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik usaha, tingkat penjualan, kondisi pasar, kemampuan mengelola modal, dan kebutuhan ekonomi anggota. Oleh sebab itu, pembiayaan *Ar-Rahn* lebih tepat dipahami sebagai salah satu faktor pendukung keberlangsungan usaha, bukan sebagai faktor tunggal yang menentukan keberhasilan usaha²².

Temuan ini penting karena menunjukkan adanya proses yang menghubungkan pembiayaan dengan kondisi ekonomi anggota. Pembiayaan memberikan akses terhadap modal, kemudian modal digunakan untuk kebutuhan usaha, dan hasil akhirnya dipengaruhi oleh kemampuan anggota mengelola dana serta kondisi lingkungan usaha. Dengan kata lain, manfaat pembiayaan bersifat kontekstual, sehingga tidak semua anggota harus mengalami perubahan ekonomi dalam bentuk yang sama.

3. Kontribusi Pembiayaan terhadap Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Anggota

¹⁹ Oktaviany, Mega, Miftah Syintatoro, dan Fathin Udzri. "Integrasi Program Pemberdayaan dan Pembiayaan Syariah dalam Membangun Kemandirian UMKM BMT Bina Ummat Sejahtera." *IMANIF: Islamic Economics, Management, and Finance Journal* 1, no. 1 (2026).

²⁰ Gina, Widya, dan Jaenal Effendi. "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro." *Al-Muzara'ah* 3, no. 1 (2015).

²¹ Alie, Maria Septijantini, dan Amelia Anwar. "Optimalisasi Akad Rahn Tasjily dalam Pembiayaan UMKM: Studi pada Toko Kelontongan di Bandar Lampung." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

²² Harp, Aphylla Planifolia, Resfa Fitri, dan Yekti Mahanani. "Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada Masa Pandemi Covid-19." *Al-Muzara'ah* 9, no. 1 (2021): 109–127.

Dalam penelitian ini, kesejahteraan dibatasi pada tiga aspek yang dapat ditelusuri berdasarkan data lapangan, yaitu penguatan modal, keberlangsungan usaha, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pembatasan tersebut penting karena kesejahteraan merupakan konsep yang luas dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima.

Dari aspek penguatan modal, pembiayaan *Ar-Rahn* memberikan manfaat yang paling jelas dalam membantu anggota memperoleh tambahan dana untuk menjalankan kegiatan usaha. Tambahan modal tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan baku, menambah persediaan, atau memenuhi kebutuhan operasional. Bagi anggota yang sebelumnya mengalami keterbatasan modal, tersedianya pembiayaan dapat memberikan ruang yang lebih besar untuk mempertahankan aktivitas usahanya.

Dari aspek keberlangsungan usaha, pemanfaatan pembiayaan untuk kebutuhan produktif membantu anggota menjaga aktivitas usaha tetap berjalan. Keberlangsungan ini menjadi bentuk manfaat yang penting karena bagi pelaku UMKM, kemampuan mempertahankan usaha merupakan bagian dari kemampuan mempertahankan sumber pendapatan. Akan tetapi, keberlangsungan usaha tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar, perubahan permintaan, harga bahan baku, dan tingkat persaingan.

Sementara itu, dari aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi, manfaat pembiayaan terlihat secara tidak langsung melalui keberlangsungan kegiatan usaha²³. Ketika usaha dapat berjalan, anggota memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi²⁴. Akan tetapi, penelitian tidak menunjukkan bahwa seluruh anggota mengalami peningkatan kondisi ekonomi dalam bentuk yang sama. Oleh karena itu, temuan lebih tepat dipahami sebagai manfaat yang dirasakan anggota, bukan sebagai bukti bahwa pembiayaan secara seragam meningkatkan tingkat kesejahteraan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan *Ar-Rahn* dapat memberikan kontribusi terhadap kondisi ekonomi melalui mekanisme tidak langsung. Pembiayaan → tambahan modal → pemanfaatan untuk kegiatan usaha → keberlangsungan usaha → peluang memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana merupakan unsur penting dalam menentukan manfaat pembiayaan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Manfaat Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat pembiayaan *Ar-Rahn* dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pendukung antara lain adanya kebutuhan nyata terhadap tambahan modal, prosedur pembiayaan yang tersedia, komunikasi antara petugas dan anggota, serta kemampuan anggota menggunakan dana untuk kebutuhan produktif. Kemampuan anggota dalam mengelola modal dan memutar hasil usaha juga menjadi bagian penting dalam mempertahankan manfaat pembiayaan.

Sebaliknya, ketidakstabilan penjualan, perubahan kondisi pasar, kebutuhan rumah tangga, dan kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran menjadi faktor yang dapat membatasi manfaat pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak

²³ Rumasukun, Sitti Harnita, dan Nani Hanifah. "Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025).

²⁴ Hidayah, Anisa Nurul. "Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Implementasi Akad Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara KCP Pagak Malang." *Jurnal Keuangan Islam dan Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 51–59.

menghilangkan risiko yang dihadapi pelaku UMKM. Tambahan modal hanya menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu anggota menghadapi keterbatasan modal, sedangkan keberhasilan pemanfaatannya tetap dipengaruhi oleh kondisi usaha dan kemampuan pengelolaan keuangan²⁵.

Dari perspektif implementasi Edwards III, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya tidak hanya struktur dan prosedur pembiayaan, tetapi juga sumber daya dan disposisi pelaksana. Petugas yang mampu memberikan informasi, melakukan monitoring, dan berkomunikasi dengan anggota dapat membantu proses pembiayaan berjalan lebih efektif. Di sisi anggota, pemahaman terhadap tujuan penggunaan dana dan kemampuan memenuhi kewajiban juga memengaruhi keberlanjutan manfaat pembiayaan.

Dengan demikian, implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* dapat dipahami sebagai hubungan timbal balik antara mekanisme lembaga dan kemampuan anggota dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan²⁶. Lembaga menyediakan mekanisme akses pembiayaan, sedangkan anggota menentukan bagaimana dana tersebut digunakan dalam aktivitas ekonominya. Interaksi kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk manfaat pembiayaan²⁷.

5. Posisi Temuan terhadap Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dapat berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan usaha mikro. Penelitian mengenai LKMS dan UMKM menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha yang membutuhkan tambahan dana. Penelitian mengenai Rahn Tasjily juga menunjukkan bahwa akad Rahn dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Namun, penelitian ini memberikan penekanan yang berbeda. Penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan kuantitatif cenderung menguji hubungan atau pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan, perkembangan usaha, maupun kesejahteraan. Sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami proses implementasi pembiayaan, pengalaman anggota, pemanfaatan dana, serta faktor yang memengaruhi manfaat pembiayaan.

Perbedaan tersebut menjadi kontribusi penting penelitian karena angka pembiayaan tidak dapat menjelaskan secara lengkap pengalaman penerima pembiayaan. Data mengenai 48 anggota dan total plafon Rp213.000.000, misalnya, menggambarkan keberadaan aktivitas pembiayaan pada objek penelitian, tetapi tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung mengenai peningkatan kesejahteraan. Informasi mengenai manfaat pembiayaan baru dapat dipahami melalui penelusuran terhadap penggunaan dana dan perubahan yang dirasakan anggota.

²⁵ Rinawati, Ika, Irfan Musadat, dan Andriati Aziizah Syafitri. "Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Pelaku UMKM." *Jurnal Keuangan Islam dan Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 74–84.

²⁶ Aditya, M. Fajar, Miswan Ansori, dan Ahmad Fauzan Mubarak. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 2 (2024): 3444–3455.

²⁷ Kurnia, Fitri, dan Yosi Kurnia. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah terhadap Kesuksesan UMKM Perempuan." *Jurnal Menara Ekonomi* 9, no. 1 (2023).

Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana pembiayaan *Ar-Rahn* dijalankan, bagaimana dana dimanfaatkan, dan dalam kondisi apa pembiayaan memberikan manfaat bagi anggota. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi pembiayaan terhadap kondisi ekonomi tidak bersifat otomatis, tetapi berlangsung melalui proses pemanfaatan dana dan dipengaruhi oleh kondisi usaha serta kemampuan anggota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan *Ar-Rahn* pada KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang meliputi pengajuan pembiayaan, pemenuhan persyaratan, pemeriksaan dan penilaian barang jaminan, penetapan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, pemanfaatan pembiayaan, monitoring, pembayaran kewajiban, hingga penyelesaian pembiayaan. Pelaksanaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga melibatkan komunikasi antara lembaga dan anggota mengenai akad, hak dan kewajiban, serta penggunaan dana pembiayaan.

Dana pembiayaan *Ar-Rahn* terutama dimanfaatkan oleh anggota untuk menambah modal kerja, membeli bahan baku, memenuhi persediaan, dan mendukung kebutuhan operasional usaha. Pemanfaatan tersebut memberikan dukungan terhadap penguatan modal dan keberlangsungan kegiatan usaha anggota. Dalam konteks kesejahteraan, manfaat yang ditemukan terutama berkaitan dengan kemampuan mempertahankan aktivitas usaha, memenuhi kebutuhan operasional, serta mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Namun, manfaat tersebut tidak bersifat seragam pada seluruh anggota karena dipengaruhi oleh produktivitas penggunaan dana, kemampuan mengelola usaha dan arus kas, kondisi penjualan, perubahan pasar, kebutuhan rumah tangga, serta kemampuan memenuhi kewajiban pembiayaan.

Adapun faktor yang mendukung pemanfaatan pembiayaan meliputi adanya kebutuhan modal, mekanisme pembiayaan berbasis jaminan, komunikasi antara petugas dan anggota, pemahaman terhadap prosedur pembiayaan, serta penggunaan dana untuk kegiatan yang produktif. Sementara itu, faktor yang dapat menghambat manfaat pembiayaan meliputi ketidakstabilan penjualan, perubahan kondisi pasar, penggunaan dana untuk kebutuhan rumah tangga, dan kewajiban pembayaran pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan *Ar-Rahn* pada KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis dapat dipahami sebagai salah satu instrumen yang mendukung akses permodalan, keberlangsungan usaha, dan kondisi ekonomi anggota, sedangkan tingkat manfaat yang dirasakan tetap bergantung pada kondisi dan kemampuan masing-masing anggota dalam mengelola pembiayaan dan kegiatan usahanya.

SARAN

KSPPS BMT Surya Raharja Cabang Jetis disarankan mempertahankan dan meningkatkan kualitas komunikasi mengenai akad, hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pembiayaan. Pendampingan anggota juga dapat diperkuat, terutama dalam pemanfaatan pembiayaan secara produktif dan pengelolaan arus kas usaha.

Pelaku UMKM penerima pembiayaan disarankan menggunakan dana sesuai tujuan yang telah direncanakan, menjaga perputaran modal, mengelola keuangan usaha secara lebih tertib, dan memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek dan informan atau membandingkan implementasi pembiayaan *Ar-Rahn* pada beberapa cabang atau lembaga keuangan mikro syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. Fajar, Miswan Ansori, and Ahmad Fauzan Mubarak. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 2 (2024): 3444–3455.
- Alie, Maria Septijantini, and Amelia Anwar. "Optimalisasi Akad Rahn Tasjily dalam Pembiayaan UMKM: Studi pada Toko Kelontongan di Bandar Lampung." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 12, no. 2 (2021): 39–44.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Apriliani, Susi, Nursantri Yanti, and Muhammad Ikhsan Harahap. "Analisis Pencapaian Produk Rahn Tasjily Tanah dalam Kemudahan Permodalan dan Peningkatan Perekonomian pada PT Pegadaian Syariah Gunungtua." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4, no. 6 (2023): 9784–9793.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln, eds. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn." Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2002.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily." Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2008.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Faristania, Reza Anida, Miswan Ansori, and Cahyaning Budi Utami. "Analisis Peran Pegadaian Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jepara." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 2 (2024): 255–268.
- Gina, Widya, and Jaenal Effendi. "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)." *Al-Muzara'ah* 3, no. 1 (2015): 34–43.
- Harp, Aphylla Planifolia, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani. "Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19." *Al-Muzara'ah* 9, no. 1 (2021): 109–127.
- Hidayah, Anisa Nurul. "Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Implementasi Akad Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara KCP Pagak Malang." *Jurnal Keuangan Islam dan Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 51–59.
- Hidayati, N., Widyastutik, and R. Wiliasih. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Omzet Usaha Nasabah: Studi Kasus KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Koja Jakarta." *Al-Muzara'ah* 2, no. 1 (2014): 54–74.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang*

- Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2017.
- Kurnia, Fitri, and Yosi Kurnia. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah terhadap Kesuksesan UMKM Perempuan." *Jurnal Menara Ekonomi* 9, no. 1 (2023).
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Munim, M., Indah Tri Kusuma, and Wahyu Qomariatul Khoiriyah. "Penerapan Akad Rahn Tasjily sebagai Alternatif Pembiayaan pada Produk Barokah UMKM." *Journal of Islamic Banking* 6, no. 2 (2025): 52–70.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2013.
- Rinawati, Ika, Irfan Musadat, and Andriati Aziizah Syafitri. "Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Pelaku UMKM." *Jurnal Keuangan Islam dan Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 74–84.
- Rodoni, Ahmad. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2015.
- Roficoh, Luluk Wahyu, and Mohammad Ghozali. "Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018).
- Rumasukun, Sitti Harnita, and Nani Hanifah. "Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 61–72.
- Sekolah, Andi Zakaria. "Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kemajuan UMKM di Indonesia: Studi Empiris." *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)* 7, no. 2 (2024).
- Subagiyo, Rokhmat. "Tinjauan Syariah tentang Pegadaian Syariah (Rahn)." *An-Nisbah* 1, no. 1 (2014).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Triana, Duama Zunin, M. Ridho, Sopian Ali, Muhammad Zaki, and Maburri. "Peran Pembiayaan Syariah dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 3 (2026).
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Zahro, Farah Selviatuz. 2024. Model Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah pada Keberhasilan Usaha UMKM: Studi Kasus KSPPS Hanada Quwais Sembada KC Purwokerto. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.